

PBAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2016 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih, yang dirumuskan melalui proses yang bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Renstra Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir dan
- f. Penetapan

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dimaksud. Penyusunan Renstra BPKD mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategis dan arah kebijakan Perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah dan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu

indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan BPKD.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5 Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata cara Perencanaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
- 13 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- 14 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023
- 15 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- 16 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
- 17 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 47 Seri D19);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah dirumuskan dengan maksud Untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam mewujudkan keterpaduan dan kebersamaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang Pengelolaan keuangan selama jangka waktu 5 tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan RT RW dan KLH, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BPKD Kota Padang Panjang 2019-2023

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan; dan
 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 3. Sub Bidang Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Verifikasi;
 2. Sub Bidang Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Akuntansi.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
 2. Sub Bidang Penatausahaan; dan
 3. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap unit yang berada dalam struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki tupoksi sebagai berikut :

2.1.a. Kepala BPKD, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya

2.1.b. Sekretariat,dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPKD.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penatausahaan keuangan;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.c. Bidang Pendapatan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan keberatan.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan dan keberatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang pada Bidang Pendapatan memiliki fungsi sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas menyelenggarakan program pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. pengelolaan urusan pendataan dan pendaftaran meliputi daftar induk wajib pajak, wajib retribusi dan PBB-P2;
- c. pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan program penetapan dan pembukuan.

Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penetapan dan pembukuan;
- b. pengelolaan urusanpenetapan dan pembukuan meliputi Wajib Pajak daerah dan memberi kartu pengenalan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah [NPWPD]; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyelenggarakan program penagihan dan keberatan pajak dan retribusi.

Sub Bidang Penagihan dan keberatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penagihan dan keberatan;
- b. pengelolaan urusanpenyetoran pajak; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2.1.d **Bidang Anggaran dan Perbendaharaan**, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Anggaran yang meliputi penyusunan dan pengendalian anggaran, data dan informasi keuangan daerah, pengelolaan kas daerah dan perbendaharaan.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan dan pengendalian anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan informasi keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan kas daerah;

- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perbendaharaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan memiliki fungsi sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan anggaran meliputi dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pengelolaan data informasi daerah.

Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang anggaran dan data informasi keuangan;
 - b. pengelolaan urusan sistem penyusunan dan pengendalian anggaran serta data informasi daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan kas daerah.

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan kas daerah;
 - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan program pengelolaan kas daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Perbendaharaan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan program perbendaharaan.

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Perbendaharaan;
- b. pengelola realisasi penerimaan dan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- c. penyelenggaraan kebijakan teknis untuk penataan usaha keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.e **Bidang Akuntansi dan Pelaporan**, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Akuntansi yang meliputi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang akuntansi;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan memiliki fungsi sebagai berikut

- (1) Sub Bidang Verifikasi yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas menyelenggarakan program verifikasi keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program verifikasi;
- b. pelaksanaan verifikasi laporan keuangan pertanggungjawaban perangkat daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program pelaporan keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelaporan keuangan; dan

b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Akuntansi yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan program akuntansi keuangan daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Akuntansi;
- b. penyelenggaraan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.f **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penatausahaan barang milik daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang pada Bidang Barang Milik Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan dan pemanfaatan aset barang milik daerah.

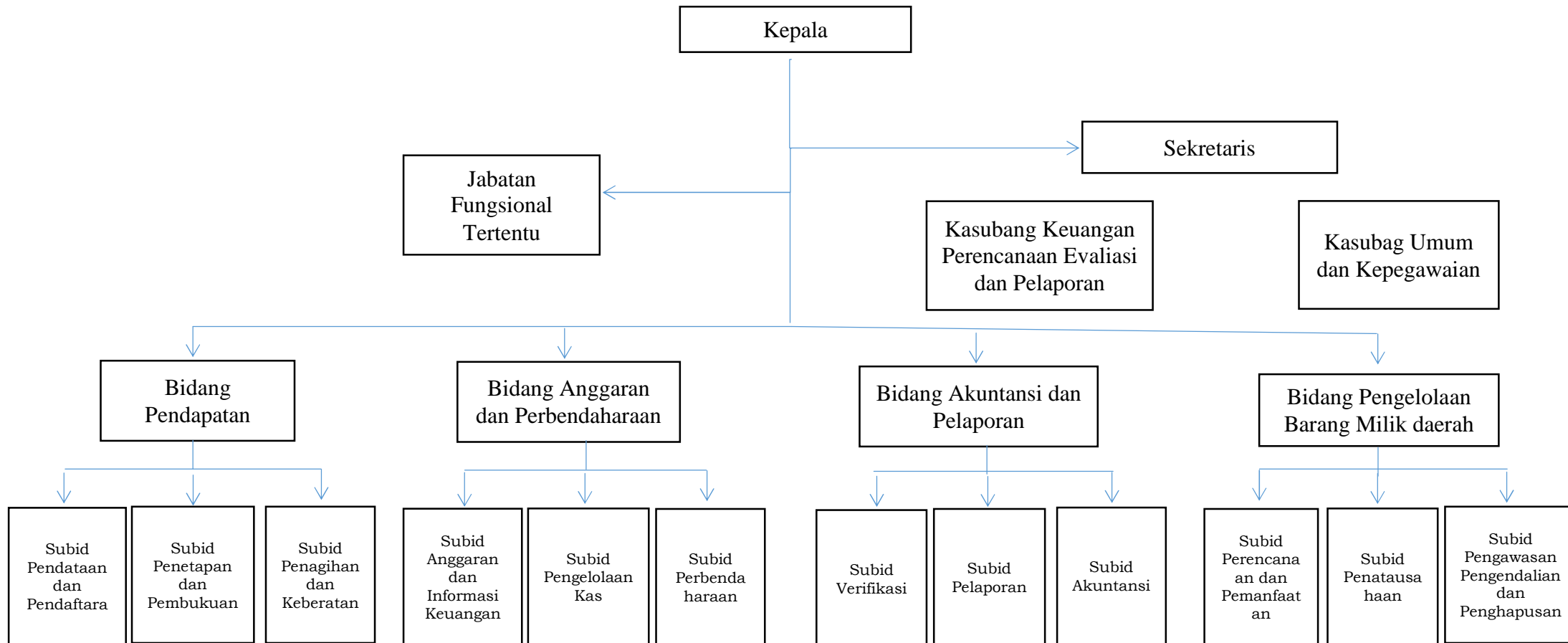
Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

- b. pengelolaan urusan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penatausahaan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas menyelenggarakan program penatausahaan barang milik daerah.
- Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan aset;
 - b. Pengelola urusan penatausahaan aset meliputi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dan penggunaan aset; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan yang dikepalai oleh Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah.
- Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. pengelola urusan pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Stuktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI



2.2. Sumber Daya OPD

1.2.1 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang didukung oleh kekuatan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan
Pada BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Desember 2018

Gol	SD		SLTP		SLTA		D.I		D.II		D.III		S.I		S.II		S.III		Tot
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1		-	-	5
III	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	2	6	7	11		1	-	-	37
II	-	-	2	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
THL	-	-	-	1	10	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	16
Jmlh	-	-	2	1	22	10	-	-	-	-	3	7	12	12	-	2	-	-	71

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Pada BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Desember 2018
(Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas)

No	Jabatan Struktural / Fungsional	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II.b	1	-	1
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	3	3	6
4	Eselon IV.a	3	7	10
5	Eselon IV.b	-	-	-
6	Fungsional	-	-	-
	Jumlah	8	10	18

2.2.2 Perlengkapan

Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Aset yang Dikuasi
BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Desember 2018

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset	Kondisi		
				B	RR/KB	RB
1.	Tanah	5	10.085.215.000,-			
2.	Peralatan dan Mesin	562	9.172.610.649,-			
	- Alat Besar	1	410.042.568,-	1		
	- Alat-alat Angkutan	87	4.751.905.048,-	73	10	4
	- Alat Ukur	3	52.750.000,-	3		
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	334	3.577.425.433,-	294	20	20
	- Alat studio dan Komunikasi	27	332.912.600,-	22	3	2
	- Alat Laboratorium	1	47.575.000,-		1	
3.	Bangunan dan Gedung	14	9.838.417.743,-			
	- Bangunan Gedung	5	9.570.590.743,-	4	1	
	- Monumen	8	267.827.000,-	5		3
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	2.216.100,-			
	Instalasi	1	2.216.100,-	1		
5.	Aset Tetap lainnya	43	14.314.950,-			
	Buku Perpustakaan	43	14.314.950,-		43	
	Total	624	29.112.774.442,-			

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan hal mutlak yang harus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan

pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban dan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis dalam upaya mewujudkan fungsi dari APBD itu sendiri yang meliputi:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan Fungsi-fungsi tersebut, maka dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip disiplin yang harus dilaksanakan mencakup, antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang

belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD

3. Pelaksanaan Anggaran, dimana semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena peraturan tersebut secara langsung akan menentukan format pengelolaannya dalam artian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah sejalan dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang frekuensinya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan penyediaan dana yang memadai.

Secara umum Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan diatas, kemudian dirinci lagi kedalam masing-masing jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. Untuk PAD, jenisnya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan, jenisnya meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
- c. Untuk lain-lain pendapatan yang sah, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya

A. Realisasi Pendapatan Daerah

Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah, maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, demikian juga untuk periode tahun 2013-2018. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Daerah tahun 2013-2018 adalah Rp.**2.564.729.108.780,06** dengan realisasi sebesar Rp.**2.675.225.929.496,36** (98,98%). Gambaran target dan realisasi pendapatan pada APBD tahun anggaran 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2014-2018

No	Tahun	Realisasi	%Kenaikan
1	2014	475.280.788.657,33	
2	2015	505.170.035.889,81	6,28%
3	2016	549.929.864.023,02	8,86%
4	2017	591.062.889.679,67	7,47%
5	2018	553.782.351.221,53	-6,3%

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang secara nominal cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan rata-rata pertumbuhan 4,7 persen. Pertumbuhan terbesar adalah pada tahun 2016 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar -6,3% persen.

1). Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya disampaikan gambaran perkembangan PAD Kota Padang Panjang periode tahun 2014-2018 yang secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2014-2018 mengalami kenaikan sebesar adalah Rp 28.150.986.331. Secara rata-rata selama periode tersebut, PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,73 persen. Pertumbuhan

terbesar pada tahun 2015 yaitu sebesar 29,9 persen dan terkecil (-) 10,2%. Pada tahun 2018. Pertumbuhan yang minus tahun 2018 disebabkan oleh :

- a. Dikeluarkannya penerimaan Dana Bos sebesar 7,5 Milyar dari komponen PAD
- b. Penurunan Deviden Bank nagari sebesar 2 milyar

Adapun rincian rencana dan realisasi PAD Kota Padang Panjang tahun 2014-2018, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2014–2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	51.601.386.498,33	
2	2015	67.035.654.310,81	29,91%
3	2016	70.350.628.266,02	4,94%
4	2017	88.837.033.624,67	26,27%
5	2018	79.752.372.829,53	-10,22%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang dirinci sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel .2.6
Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2014–2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	5.388.058.175,00	
2	2015	5.556.826.451,00	3,13%
3	2016	6.134.371.477,00	10,39%
4	2017	6.906.484.263,00	12,58%
5	2018	8.293.992.612,00	20,08%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Dari sisi realisasi terlihat bahwa selama periode tersebut, pencapaian pajak daerah setiap tahunnya terjadi naik turun, namun secara rata-rata Pajak Daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar yaitu 11,55 %. Secara keseluruhan total rencana Pajak Daerah periode tahun 2014-2018 adalah Rp.31.403.731.714,00 dengan realisasi sebesar Rp.32.279.732.978,00,- (102,78%).

Demikian juga dengan retribusi daerah, selama periode tahun 2014–2018 pencapaian retribusi daerah menunjukkan peningkatan positif dan negatif namun secara penerimaan dari sektor retribusi Kota Padang Panjang terealisasi sebesar Rp.23.473.097.717,69 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.24.430.872.000,00 atau sebesar (96,07%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel .2.7
Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Kota Padang Panjang
Periode 2014–2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	4.602.131.527,34	
2	2015	4.488.801.379,68	-2,46%
3	2016	5.088.861.331,05	13,00%
4	2017	4.134.303.831,39	-18,75%
5	2018	5.158.999.649,90	24,78%

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Jika dilihat dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh dari perusahaan daerah, BUMD dan bagi hasil dana revolving serta lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian serta kontribusi pihak ketiga secara keseluruhan pencapaiannya masih dibawah 100 persen, hal ini disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah sangat tergantung dari pihak lain seperti BUMD dan kontribusi pihak ketiga, untuk lebih jelasnya perkembangan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel . 2.8
Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Kota Padang Panjang Periode 2014–2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	4.453.824.848,00	
2	2015	5.760.138.840,00	29,33%
3	2016	5.067.982.880,00	-12,01%
4	2017	7.693.432.872,00	51,80%
5	2018	5.795.081.205,00	-24,67%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Tabel .2.9
Realisasi Lain-lain PAD yang sah Kota Padang Panjang
Periode 2014-2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
2	2014	37.157.371.947,99	
3	2015	51.229.887.640,13	37,87%
4	2016	54.059.412.577,97	5,52%
5	2017	70.102.812.658,28	29,67%
6	2018	60.504.299.362,63	-13,69%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Dari tabel komponen Lain-lain PAD yang sah diatas, terlihat ada peningkatan pada setiap tahunnya. Dari total rencana selama 5 tahun terakhir sebesar **Rp.252.955.797.965,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp.273.053.784.184,67**(107,94%). Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 14,84%.

2). Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan tranfer Pemerintah Daerah lainnya, Bantuan Keuangan Provinsi. Sebagian besar Pendapatan Daerah memang berasal dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan secara total rencana Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang selama periode tahun 2014-2018 adalah sebesar Rp.**2.169.002.777.024,-** dengan realisasi Rp.**2.103.284.605.061,-**(96,97%). Adapun rincian rencana dan realisasi dari penerimaan yang berasal dari dana perimbangan tahun 2014 - 2018 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel . 2.10
Realisasi Pendapatan Dari Dana Perimbangan
Kota Padang Panjang Periode 2014-2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	378.738.216.086,00	
2	2015	381.194.551.009,00	0,64%
3	2016	461.720.096.046,00	21,12%
4	2017	439.519.041.267,00	-4,80%
5	2018	442.112.700.653,00	0,59%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Dari tabel diatas terlihat pendapatan dari dana perimbangan mengalami kenaikan tambah (+) dan kurang (-) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,39% hal ini sangat tergantung dari kebijakan pemerintah terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya dari komponen Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat lainnya, dari rata-rata total rencana sebesar Rp.118.704.282.000,00,- terealisasi Rp.114.704.282.000,00 (96,63%), tahun 2016 Kota Padang Panjang

tidak memperoleh pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat Lainnya. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel .2.11
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Kota Padang Panjang Periode 2014-2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	30.186.585.000,00	
2	2015	37.681.329.000,00	24,82%
3	2016	-	-
4	2017	42.836.368.000,00	-
5	2018	4.000.000.000,00	- 90,66%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Selanjutnya pada rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi rata-rata pendapatan Kota Padang Panjang selama 5 tahun terakhir yang direncanakan sebesar Rp.70.427.903.194,- terealisasi sebesar Rp.76.960.585.733,- (109,27%). Penerimaan dari jenis pendapatan ini terlihat adanya peningkatan pada setiap tahunnya sebagaimana terlihat dari tabel dibawa ini :

Tabel . 2.12
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
Kota Padang Panjang Periode 2014-2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	-	-
2	2015	19.258.501.570,00	-
3	2016	17.759.139.711,00	-7,78%
4	2017	19.470.446.788,00	9,63%
5	2018	20.472.497.664,00	5,14%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Tabel . 2.14
Realisasi Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Padang Panjang Periode 2014-2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	14.754.601.073,00	-
2	2015	-	-
3	2016	54.059.141.577,97	-
4	2017	62.706.814.788,00	15,99%
5	2018	7.444.780.075,00	-88,12%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Rekening Pendapatan Daerah yang terakhir adalah berasal dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, dari 5 tahun terakhir pendapatan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari rata-rata pendapatan sector ini telah menyumbang sebesar Rp.138.965.337.513,97,- (104,49%) dari Rencana sebesar Rp.132.988.875.316,00,-.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Secara konseptual Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Secara garis besar Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa seiring dengan kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun, maka juga diikuti adanya kecenderungan peningkatan pada struktur belanja daerah. Kecenderungan peningkatan ini tentunya sejalan pula dengan perkembangan program, kegiatan dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi umum pendapatan daerah, maka dilakukan beberapa kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah tahun 2013 - 2018 yang

muaranya diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang kewenangan sebagaimana telah dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2013-2018

Berdasarkan pengelompokkan belanja daerah, secara garis besar dapat dikelompokkan atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

❖ **Belanja Tidak Langsung**, terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja Tidak Terduga.

❖ **Belanja Langsung**, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal.

Disamping itu dalam penyusunan belanja daerah tahun 2013- 2018 tetap mengacu kepada prinsip- prinsip umum penyusunan APBD antara lain mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat, menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran, mengutamakan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari PAD.

Realisasi Belanja

Secara keseluruhan total rencana Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 adalah Rp.3.111.635.121.683,56 dengan realisasi sebesar Rp.2.447.726.706.195,76(78,66%). Adapun gambaran umum perkembangan rencana dan realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang periode Tahun Anggaran 2013-2018 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Rencana dan Realisasi Belanja Daerah
Kota Padang Panjang
Periode 2014-2018

No	Tahun	Realisasi	% Kenaikan
1	2014	406.617.041.960,00	
2	2015	491.459.794.814,00	20,86%
3	2016	548.357.928.458,41	11,57%
4	2017	607.630.104.037,99	10,89%
5	2018	612.982.009.674,00	0,88%

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Secara umum pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dari Tahun 2014 - 2018, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip umum pengelolaan anggaran antara lain prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Selanjutnya disampaikan bahwa walaupun adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam Anggaran Belanja Daerah selama Tahun 2014-2018, namun secara umum dalam pengalokasian dan penggunaannya masih tetap berdasarkan Pendekatan Anggaran Kinerja (berorientasi pada hasil) dengan tujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta mempertegas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang didukung pula dengan Standar Satuan Harga. Disamping itu kita tetap komit, bahwa dalam pengelolaan Anggaran Tahun 2013- 2017 tetap memperhatikan prinsip - prinsip penyusunan APBD seperti :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
2. Disiplin Anggaran.
3. Keadilan Anggaran.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Secara umum Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2013-2018 pada dasarnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan umumnya digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Adapun gambaran target dan realisasi dari Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, baik itu aspek Penerimaan maupun aspek Pengeluaran Pembiayaan Daerah seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2013-2018

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan			Pengeluaran Pembiayaan		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2013	67.577.692.601,17	67.577.692.601,17	100,00	10.007.000.000,00	10.007.000.000,00	100,00
2	2014	81.402.082.735,64	81.402.082.735,64	100,00	15.000.000.000,00	-	0,00
3	2015	150.065.829.432,97	150.065.829.432,97	100,00	16.800.000.000,00	15.800.000.000,00	94,05
4	2016	147.976.070.508,78	147.976.070.508,78	100,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00
5	2017	145.651.337.624,39	145.651.337.624,39	100,00	-	-	-
6	2018	128.606.014.888,07	128.606.014.888,07	100,00	-	-	-
JUMLAH		519,411,012,902.95	519,411,012,902.95	100.00	45,207,000,000.00	29,207,000,000.00	64.61

Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018

Dalam kontek organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan. Secara umum Kinerja Pelayanan OPD mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

Dalam Kinerja Pelayanan BPKD Kota Padang Panjang baik dari sisi kinerja maupun realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan, telah sesuai

dengan target yang ditetapkan . hal ini tergambar pada tabel 2.16 dan 2.17 dibawah ini :

TABEL 2.16.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi BPKD
Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya pemahaman SDM tentang Pengelolaan keuangan daerah				229 orang	219 orang	-	229 orang	138 orang	-	100%	63,01%	-
2.	Jumlah peraturan/prosedur pengelolaan keuangan daerah				6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	100%
3.	Amprah gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang				27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (988 amprah / tahun) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (988 amprah / tahun) 100 %	100%	100%	100%
4.	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis aplikasi dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah				27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	100%	100%	100%
5.	Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganggaran				100%	(4 dokumen) 100 %	(4 dokumen) 100 %	100%	(4 dokumen) 100 %	(4 dokumen) 100 %	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	Tersedianya data kajian investasi daerah				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	-	100%	0%
7.	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%
8.	Tersedianya data keuangan daerah				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%
9.	Tersusunnya laporan rekonsiliasi data keuangan daerah				4 dokumen	-	-	4 dokumen	-	-	100%	-	-
10.	Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya				2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%
11.	Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah				46.724.333.148	53.068.561.858,50	67,24 M	51,5 M	67,154 M	70,34 M	110,27 %	126,54 %	104,62 %
12.	Tercapainya target PBB-P2				900.000.000	1.039.739.000,00	1 M	813,5 jt	821,4 jt	772,22 jt	90,39 %	79,01 %	77,22 %
13.	Tercapainya target BPHTB				600.000.000	650 Juta	858,34 jt	684,2 jt	695,9 jt	1,1 M	109,91 %	107,07 %	134,75 %
14.	Tersedianya data / dokumen peraturan pajak daerah				1 Perwako	1 Perwako	-	1 rancangan perwako BPHTB	1 rancangan perub. Perwako Pajak Daerah	-	100%	100%	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15.	Bertambah / meningkatnya jumlah objek pajak daerah				130 objek pajak	-	-	0	-	-	0%	-	-
16.	Meningkatnya pemahaman SDM tentang peraturan Daerah PBB-P2				500 orang / 16 kelurahan	-	-	0	-	-	0%	-	-
17.	Tersedianya kajian potensi PAD				-	1 Dokumen	-	-	1 rancangan Perub. Perwako pajak Daerah	-	-	100%	-
18.	Buku semesteran dan tahunan BMD dan buku risalah lelang dan penghapusan BMD				70 buku (27 SKPD)	70 Buku (27 SKPD)	70 Buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%
19.	Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD (buku daftar rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD)				45 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	90 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	90 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%
20.	Jumlah aset tanah yang diberi plang nama tanah				27 SKPD / 203 persil tanah	-	-	27 SKPD / 203 persil tanah	-	-	100%	-	-
21.	Tersajinya data daerah (BMD) secara periodik dan valid				60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%
22.	Jumlah kendaraan, bangunan dan pasar yang diasuransikan				265 unit	426 unit	-	405 unit	426 unit	-	152,83 %	100%	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23.	Terlaksananya penilaian terhadap aset-aset rusak berat yang telah dihapuskan untuk tujuan pelelangan				-	75 laporan penilaian dari KPKNL	-	-	75 laporan penilaian dari KPKNL	-	-	100%	-
24.	Terlaksananya penilaian terhadap tanah pasar pusat yang akan dijadikan objek perjanjian kerjasama dengan investor				-	1 Laporan penilaian tanah	-	-	1 Laporan penilaian tanah	-	-	100%	-
25.	Jumlah Polis Asuransi yang dihasilkan				-	-	5 Polis	-	-	5 Polis	-	-	100%

TABEL 2.16.b
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BPKD
Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun 2017	Realisasi Capaian tahun 2017	Rasio Capaian pada Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya Sisitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis aplikasi dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan , pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah				100%	100%	100%
2.	Tersedianya Kajian PAD Kota Padang Panjang				1 Kajian	-	0%
3.	Terlaksananya Kajian Investasi Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.	Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganggaran				6 Dokumen	6 Dokumen	100%
5.	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu				5 Dokumen	5 Dokumen	100%
6.	Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya				4 dokumen	4 dokumen	100%
7.	Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah				14.000 OP	13.8	97,97%

8.	Terkelolanya Aset Daerah				2 dokumen	2 dokumen	100%
9.	Terdatanya kebutuhan Pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD				2 dokumen	2 dokumen	100%
10.	Tersajinya data daerah (BMD) secara periodik dan valid				60 buku	60 buku	100%
11.	Jumlah polis asuransi yang dihasilkan				4 polis	4 polis	100%
15.	Tertatanya manajemen aset / barang daerah				1 Ranperda	1 Ranperda	100%

TABEL 2.16.c
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BPKD
Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun 2017	Realisasi Capaian tahun 2017	Rasio Capaian pada Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek				50%	48,7%	96,73%
2.	Penyusunan APBD/APBDP Kota Padang Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai Inpres No.1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganggaran				Tepat	Tepat	100%
3.	Opini BPK terhadap laporan keuangan				WTP	WTP	100%
4.	Persentase Peningkatan target Pendapatan Asli daerah				- 4,76%	- 10,23%	94,25%
5.	Persentase Pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah				15%	14,44%	96,27%
6.	Tersedianya data objek pajak yang tervalidasi				90%	90%	100%
7.	Persentase pemanfaatan aset daerah				70%	93,21%	132,90%
8.	Persentase terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD				90%	90%	100%

TABEL 2.17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKD
Kota Padang Panjang

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	5,900,000	6,800,000	5,000,000	6,800,000	9,875,000	4,762,500	6,324,000	4,586,500	5,712,000	4,500,000	81%	93%	92%	84%	47%	6,875,000	5,224,333
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114,200,000	175,000,000	151,600,000	165,800,000	194,600,000	65,907,129	101,012,789	125,420,976	142,996,086	141,000,923	58%	58%	83%	86%	74%	160,240,000	97,446,965
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	733,225,000	763,025,000	581,324,196	563,050,000	519,834,292	640,092,123	714,550,886	581,324,196	563,019,000	514,104,292	87%	94%	100%	100%	99%	632,091,698	645,322,402
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	377,648,000	356,156,000	409,645,920	469,145,520	458,045,520	314,290,500	262,322,665	312,457,901	372,189,434	329,622,223	83%	74%	76%	79%	72%	414,128,192	296,357,022
5.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	805,150,000	881,765,000	1,147,700,000	1,359,600,000	425,000,000	726,220,000	743,318,678	1,142,628,305	1,293,700,000	0	90%	84%	100%	95%	0%	923,843,000	870,722,328
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	118,539,000	263,983,000	342,661,430	365,881,725	380,066,725	106,718,000	229,625,000	306,249,860	335,054,326	290,975,489	90%	87%	89%	92%	78%	294,226,376	214,197,620
7.	Penyediaan alat tulis kantor	173,044,000	150,000,000	131,250,000	130,000,000	125,000,000	121,987,500	128,724,000	130,762,500	128,506,500	105,240,000	70%	86%	100%	99%	84%	141,858,800	127,158,000
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	228,980,000	234,469,000	184,760,000	192,070,000	250,425,000	125,506,500	120,091,150	140,342,300	115,774,700	142,427,000	55%	51%	76%	60%	58%	218,140,800	128,646,650
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9,917,000	18,000,000	7,827,000	7,827,000	15,000,000	2,975,000	17,982,000	3,912,500	7,010,000	10,956,000	30%	100%	50%	90%	68%	11,714,200	8,289,833
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	800,000	1,500,000	0	0	0	732,200	992,000	0	0	0	92%	66%	0%	0%	0%	460,000	862,100

11.	Penyediaan makanan dan minuman	162,000,000	114,500,000	131,340,000	99,000,000	115,000,000	52,752,150	72,996,000	70,996,200	52,406,200	44,984,100	33%	64%	54%	53%	43%	124,368,000	65,581,450
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	480,000,000	510,000,000	474,880,000	735,100,000	840,000,000	354,601,309	501,040,908	473,837,111	695,893,612	716,868,175	74%	98%	100%	95%	90%	607,996,000	443,159,776
13.	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	43,300,000	42,500,000	26,472,680	31,412,000	168,244,600	43,300,000	41,100,000	26,461,340	31,365,876	67,849,632	100%	97%	100%	100%	41%	62,385,856	36,953,780
14.	Pencetakan DAGDA dengan sistem komputerisasi	59,700,000	24,550,000	52,550,000	51,400,000	0	41,810,000	20,850,000	42,700,000	49,710,000	0	70%	85%	81%	97%	0%	37,640,000	35,120,000
15.	Premi tenaga kerja dan kesehatan masyarakat	125,000,000	27,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	30,486,000	0
16.	Penyediaan sewa tanah	45,000,000	45,000,000	46,878,222	71,000,000	71,000,000	31,703,199	39,341,615	37,888,222	64,111,364	60,800,000	70%	87%	81%	90%	87%	55,775,644	36,311,012
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
17.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	401,110,000	733,845,000	20,055,000	254,315,612	217,870,000	0	722,852,500	20,055,000	254,315,612	217,870,000	0%	99%	100%	100%	100%	325,439,122	371,453,750
18.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72,500,000	1,023,390,000	119,777,387	545,005,995	503,940,000	48,850,000	849,575,000	119,777,387	545,005,955	452,669,600	67%	83%	100%	100%	94%	452,922,676	339,400,796
19.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	167,500,000	80,850,000	84,316,100	65,000,000	130,000,000	100,388,000	21,925,000	61,238,280	43,034,372	73,507,100	60%	27%	73%	66%	54%	105,533,220	61,183,760
20.	Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor	77,350,000	107,300,000	30,000,000	40,000,000	42,500,000	18,930,000	26,575,000	15,263,000	14,178,000	35,000,000	24%	25%	51%	35%	81%	59,430,000	20,256,000
21.	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	0	0	0	6,580,645	0	0	0	0	829,680	0	0%	0%	0%	13%	0%	1,316,129	0
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	

22.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	41,000,000	45,000,000	0	0	64,800,000	21,250,000	41,220,000	0	0	64,800,000	52%	92%	0%	0%	100%	30,160,000	31,235,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
23.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	100,000,000	50,000,000	75,000,000	89,550,000	170,000,000	21,150,000	20,750,000	43,000,000	87,500,000	164,442,050	21%	42%	57%	98%	98%	96,910,000	28,300,000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
24.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,907,500	960,000	0	0	0	0	908,000	0	0	0	0%	95%	0%	0%	0%	573,500	908,000
25.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1,204,000	1,354,000	0	0	0	1,204,000	1,351,000	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%	511,600	1,277,500
26.	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	996,000	1,025,000	0	0	0	996,000	1,025,000	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%	404,200	1,010,500
27.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6,910,000	2,630,000	0	0	0	5,838,800	2,256,000	0	0	0	84%	86%	0%	0%	0%	1,908,000	4,047,400
28.	Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Daerah	23,750,000	24,600,000	9,725,000	9,725,000	11,830,000	21,256,350	22,200,000	9,296,400	8,800,000	10,420,000	90%	90%	96%	90%	92%	15,926,000	17,584,250
29.	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran daerah	10,825,000	12,171,000	2,233,500	2,333,500	2,225,500	8,152,500	8,242,000	1,956,300	1,775,000	1,465,500	75%	68%	88%	76%	69%	5,957,700	6,116,933

30.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun daerah	471,000,000	48,500,000	58,750,000	49,300,000	171,980,000	21,277,000	43,586,000	54,108,100	46,539,400	106,796,240	5%	90%	92%	94%	62%	159,906,000	39,657,033
31.	Verifikasi data laporan keuangan SKPD	33,122,000	35,490,000	7,760,000	7,760,000	13,394,000	32,310,000	30,181,950	6,903,500	4,460,800	10,996,000	98%	85%	89%	57%	78%	19,505,200	23,131,817
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																	
32.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah	0	0	0	16,275,000	0	0	0	0	11,147,200	0	0%	0%	0%	68%	0%	3,255,000	
33.	Penyusunan standar satuan harga	48,650,000	29,700,000	0	0	0	38,374,350	21,775,400	0	0	0	79%	73%	0%	0%	0%	15,670,000	30,074,875
34.	Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	43,782,500	0	0	0	0	5,291,250	0	0	0	0	12%	0%	0%	0%	0%	8,756,500	5,291,250
35.	Penyusunan Ranperda tentang APBD	217,613,000	195,075,000	249,300,000	208,187,500	365,195,000	109,623,900	96,025,800	138,985,300	191,351,193	316,368,388	50%	49%	56%	92%	90%	247,074,100	114,878,333
36.	Penyusunan Ranper KDH tentang penjabaran APBD	48,150,000	48,400,000	0	0	0	16,505,225	33,686,000	0	0	0	34%	70%	0%	0%	0%	19,310,000	25,095,613
37.	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	189,513,000	193,275,000	108,700,000	109,450,000	183,690,000	92,216,250	84,747,500	85,505,700	95,800,000	155,698,750	49%	44%	79%	88%	86%	156,925,600	87,489,817
38.	Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	36,267,500	40,600,000	0	0	0	25,606,500	27,602,000	0	0	0	71%	68%	0%	0%	0%	15,373,500	26,604,250
39.	Penyusunan Ranperda KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	138,209,000	84,102,500	80,065,000	80,480,000	90,770,000	66,772,425	69,307,500	75,057,100	66,689,800	73,370,630	48%	82%	94%	83%	83%	94,725,300	70,379,008

40.	Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	42,808,000	52,100,000	0	0	0	28,228,050	41,885,300	0	0	0	66%	80%	0%	0%	0%	18,981,600	35,056,675
41.	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	271,660,000	247,400,000	286,140,000	312,700,000	313,000,000	87,490,935	130,892,487	257,128,813	240,209,084	195,882,950	32%	53%	90%	77%	67%	286,180,000	158,504,078
42.	Bintek Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	209,351,000	341,782,000	0	0	0	93,004,500	207,305,000	0	0	0	44%	61%	0%	0%	0%	110,226,600	150,154,750
43.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	143,870,000	101,165,000	73,340,000	390,702,000	439,125,000	78,744,000	80,524,271	63,160,000	349,468,653	369,749,867	55%	80%	86%	89%	83%	229,640,400	74,142,757
44.	Penelitian dan Penggandaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD	95,288,000	215,400,000	88,500,000	76,195,000	41,110,000	58,794,225	115,718,700	26,545,800	51,947,200	26,674,150	62%	54%	30%	68%	60%	103,298,600	67,019,575
45.	Peningkatan Wawasan Aparat Pemungut PBB, Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	350,000,000	0	0	0	0	331,600,700	0	0	0	0	95%	0%	0%	0%	0%	70,000,000	331,600,700
46.	Pendataan Objek Pajak	0	0	0	100,000,000	252,570,000	0	0	0	94,659,700	238,048,100	0%	0%	0%	0%	92%	70,514,000	
47.	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	41,625,000	0	0	0	0	29,266,475	0	0	0	0	70%	0%	0%	0%	0%	8,325,000	29,266,475
48.	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB	320,430,000	244,100,000	275,085,000	400,000,000	196,650,000	202,473,950	198,790,529	195,274,368	374,099,796	137,621,848	63%	81%	71%	94%	76%	287,253,000	198,846,282
49.	Penyusunan Revisi Rancangan Perwako BPHTB	30,000,000	0	0	0	0	9,350,000	0	0	0	0	31%	0%	0%	0%	0%	6,000,000	9,350,000
50.	Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD	24,155,000	22,400,000	7,010,000	7,010,000	17,040,000	23,945,600	12,761,000	3,759,500	6,458,600	15,722,800	99%	57%	54%	92%	86%	15,523,000	13,488,700
51.	Penghapusan dan Penjualan BMD	66,925,000	75,290,000	111,115,000	119,580,000	129,525,000	17,727,300	42,045,300	69,382,900	81,403,000	11,736,000	26%	56%	62%	68%	10%	100,487,000	43,051,833

52.	Penyusunan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD	73,480,000	76,820,000	96,200,000	58,550,000	14,215,000	70,973,000	75,465,500	92,040,000	50,663,400	6,329,600	97%	98%	96%	87%	47%	63,853,000	79,492,833
53.	Sosialisasi Perda PBB-P2	138,665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	27,733,000	0
54.	Pengkajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	173,800,000	232,710,000	0	43,000,000	0	0	217,121,645	0	0	0	0%	93%	0%	0%	0%	89,902,000	217,121,645
55.	Penyajian Data Aset Daerah	41,745,000	32,090,000	10,940,000	10,940,000	11,620,000	20,684,000	7,671,000	6,566,200	7,773,400	11,527,000	50%	24%	60%	71%	100%	21,467,000	11,640,400
56.	Pemasangan Plang Nama Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang Panjang	195,473,000	0	0	0	0	175,416,900	0	0	0	0	90%	0%	0%	0%	0%	39,094,600	175,416,900
57.	Penyusunan Perubahan Rancangan Perwako Pajak Daerah	0	23,950,000	0	0	0	0	19,934,700	0	0	0	0%	83%	0%	0%	0%	4,790,000	19,934,700
58.	Pengkajian Investasi Daerah	0	16,885,000	34,600,000	69,050,000	69,050,000	0	11,885,000	0	25,911,000	0	0%	70%	0%	38%	0%	37,917,000	11,885,000
59.	Penilaian Aset Daerah	0	83,750,000	0	0	0	0	58,985,000	0	0	0	0%	70%	0%	0%	0%	16,750,000	58,985,000
60.	Penyusunan Standar Biaya	0	0	29,800,000	45,960,000	5,830,000	0	0	25,010,000	25,010,000	4,004,300	0%	0%	84%	54%	80%	16,318,000	25,010,000
61.	Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD	0	0	0	0	12,090,000	0	0	0	0	3,727,100	0%	0%	0%	0%	28%	2,418,000	0
62.	Penghapusan data piutang penyerahan PBB-P2	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	10,819,700	0%	0%	0%	0%	86%	2,400,000	0
63.	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	40,567,200	0	0%	0%	0%	81%	0%	10,000,000	0

2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang menghadapi beberapa masalah atau tantangan. Tantangan tersebut meliputi Sumber Daya manusia, Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah, tantangan-tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Terbatasnya Sumber dan Potensi Pendapatan Daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan PAD yang disebabkan belum Optimalnya Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah, pelaksanaan administrasi Pendapatan Daerah sebagai piranti dalam mendorong akselerasi penerimaan PAD yang masih relative lemah dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kesadaran sebagai wajib pajak.
 - b. Dengan pengalihan beberapa jenis pajak dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota maka Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini dikelola oleh KPP Pratama terhitung mulai tahun 2014 PBB-P2 menjadi salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal peningkatan PAD yang akan mendanai pembangunan Kota Padang Panjang. Disamping itu Pembaharuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus dilakukan penghitungan kembali paling tidak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun harus diubah, sesuai dengan perkembangan laju pembangunan.
2. Dalam hal Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Terjadinya perubahan-perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah baik tentang penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dimana diperlukan penyesuaian-penyesuaian kembali dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tingkat OPD dan BPKD.
 - b. Keterbatasan pemahaman tentang SAP baik di tingkat OPD maupun di BPKD, hal ini akan berimbas kepada Penyusunan Laporan Keuangan pada OPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah.

3. Dalam hal Aset Daerah tantangan yang dihadapi meliputi:
- a. Belum terosialisasinya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga berakibat terhadap pelaporan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang di kelola Pemerintah Kota Padang Panjang.
 - b. Masih adanya kesalahan administrasi yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan kegiatan yang melalui mekanisme lelang, bahkan ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan.
 - b. Terdapatnya asset yang menganggur dan tidak dimanfaatkan .
 - c. Aset yang di peroleh dari Hibah/Pinjam pakai dari Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dilengkapi dengan Dokumen pendukung.

Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dan dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

- a. Melakukan penyamaan persepsi antara OPD dengan BPKD terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek terkait pengelolaan keuangan daerah.
- b. Memaksimalkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi PAD melalui pengkajian dan pemetaan potensi PAD melalui Penyempurnaan Perda dan Perwako di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan pengoptimalkan manajemen pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta Melakukan Sosialisasi dan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Dengan keluarnya Perda No.1 tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Peningkatan Pendapatan PBB-P2 serta Mengoptimalkan kinerja penagihan dilapangan terutama pada Kelurahan-kelurahan, Kecamatan dan BPKD untuk mengoptimalkan Pendapatan yang bersumber dari PBB- P2.
- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi, baik melalui lintas sektor dan program.
- e. Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang membantu proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah.
- f. Semangat untuk memperoleh opini WTP.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa Tugas BPKD adalah membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas BPKD menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKD
Kota Padang Panjang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. PAD belum optimal	1. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan.	1. Jumlah SDM yg kurang (Petugas pemungut pajak) 2. Belum adanya juru sita pajak daerah 3. Belum adanya PPNS pajak dan retribusi daerah	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 2. Ketersediaan data dasar potensi pendapatan masih terbatas 3. Beberapa OPD berusaha untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, yang merupakan salah satu ukuran kinerja dan keberhasilan OPD. 4. Tidak seluruh masyarakat memahami peraturan tentang	1. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan belum optimal 2. Belum optimalnya penegakan perangkat peraturan tentang pajak dan retribusi 3. Masih adanya Potensi Pendapatan yang belum

				pajak dan retribusi daerah	dapat di ambil untuk meningkatkan PAD.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	<p>1. Sebagian besar aset daerah yang menganggur dan tidak dimanfaatkan</p> <p>2. Aset yang diperoleh dari Hibah/Pinjam Pakai dari Pemerintah pusat dan propinsi tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung</p>	1. Peraturan dan Dokumen yang mengatur tentang aset daerah	<p>1. kurang tertibnya pemanfaatan aset daerah</p> <p>2. Belum tersedianya data pendukung aset yang berasal dari hibah/pinjam pakai pemerintah pusat dan propinsi</p>	<p>1. kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan aset pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>2. sering terjadinya pergantian pejabat pengurus, penyimpan dan pembantu pengurus barang</p>	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang	Temuan BPK atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Masih kurangnya koordinasi dalam pencatatan dan pengelolaan aset antara SKPD Induk dengan UPTD	Untuk mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK.

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan.	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4	Meningkatnya kerjasama antara negara	Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat	(4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun kedepan. Adapun Visi Kota Padang Panjang adalah **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**.

Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah 3 misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatan. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Saerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;

2. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kota Padang Panjang, BPKD berkontribusi untuk mewujudkan misi yang ada dalam RPJMD yaitu misi 3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif. Mencermati dinamika kehidupan bernegara yang menuntut proses penegakan hukum secara adil dan merata, maka pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 adalah untuk menjadi acuan dan pedoman oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang agar mempersiapkan program kerja tahunan yang dapat menuntun dan membentuk arah agar Pemerintah Kota Padang Panjang baik secara personal maupun secara Institusi tidak terjerat kasus hukum. Khusus untuk BPKD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagai tugas Kepala Daerah dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah yang sangat rentan timbulnya berbagai penyimpangan makanya perlu membekali sistem kerja dan rencana kegiatan yang betul-betul berpedoman dan mengacu kepada hukum dan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah baik yang mengacu kepada regulasi yang diterbitkan oleh Induk Organisasi seperti Departemen Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan.

Opini WTP adalah suatu kebutuhan pengakuan bagi setiap pemda terhadap terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel yang dapat diyakini kewajarannya. Mempertahankan opini WTP tidak hanya dapat dipandang sebatas obsesi Kepala Daerah tetapi mutlak sebagai kebutuhan setiap Pemerintah Daerah untuk meyakini kebenaran pelaksanaan pendaerahan yang dipimpinnya.

3.3. Telaahan Renstra Propinsi

Bertitik tolak dari Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam bagian Prioritas Pembangunan daerah yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu juga mendefinisikan factor pendorong serta factor penghambat permasalahan pelayanan yang akan mempengaruhi tercapainya sasaran yang ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada prinsipnya program dan kegiatan pada BPKD Kota Padang Panjang secara khusus tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instansi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 – 2023, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkah-langkah kedepan.

Tabel. 3.3
KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN

KELEMAHAN		KEKUATAN	
(1)	Kurangnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	(1)	Tersedianya Perda, Perwal dan Keputusan Gubernur tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
(2)	Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.	(2)	Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(3)	Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan dan Aset Daerah	(3)	Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
(4)	Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.	(4)	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.
Peluang		Ancaman	
(1)	Laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukkan angka positif dan progresif.	(1)	Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro
(2)	Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif.	(2)	Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi
(3)	Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah	(3)	Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya.
		(4)	Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada
		(5)	Pekerjaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 5(lima) ke tahun depan, adalah :

1. *Peningkatan Pengelolaan keuangan Daerah*
2. *Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan PAD*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian target kerja untuk lima tahun ke depan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai langkah awal pelaksanaan tugas.

4.1 TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai lima tahun kedepan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah ***“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***

4.2 SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2019-2023 adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke 5	Target Kinerja Sasaran					Definisi Operasional
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah		Opini Atas laporan Keuangan Pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penyajian laporan Keuangan sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Kesesuaian Laporan Keuangan dengan peraturan Perundang-undangan
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	25%	5%	5%	5%	5%	5%	Realisasi Tahun awal Renstra X 5% + Relaisasi Tahun Sebelumnya

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2.1 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan BPKD Kota Padang Panjang menggunakan strategi sebagai berikut :

1. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan dua strategi yaitu :
 - a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, strategi ini sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab.
 - b. Disiplin anggaran, strategi ini bertujuan untuk program yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan Antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - c. Efisiensi dan efektivitas anggaran yaitu dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, sehingga di dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh.
2. Untuk pencapaian Sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD digunakan 3 strategi yaitu :
 - a. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan.
 - b. Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru.
 - c. Mengintensifkan penagihan dan peningkatan monitoring.

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Berikut ini penjelasan dan uraian dari strategi dan kebijakan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan strategi Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan kebijakan :
 - a) Melakukan prosedur penganggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 - b) Transparansi dan Akuntabel pada Penganggaran Pemerintah Kota Padang Panjang
 - c) Singkronisasi Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran dalam penyusunan anggaran daerah.
2. Kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan adalah :
 - a). Menerbitkan pedoman tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
 - b). Memanfaatkan Teknologi Informatika dalam pengelolaan keuangan daerah
 - c). Penyempurnaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kebijakan menerbitkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
3. Kebijakan untuk pelaksanaan strategi melaksanakan penataan aset dan kekayaan daerah secara optimal adalah dengan Menginventarisir dan melakukan pengamanan terhadap aset daerah secara berkelanjutan
4. Untuk Menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan PAD seperti yang telah ditetapkan maka akan digunakan kebijakan sebagai berikut :
 - a). Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi daerah
 - b). Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pelaksanaan Tugas Pemungutan Pajak dan Retribusi

Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan pada BPKD Tahun 2019-2023 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pengelolaan Penganggaran dan Perbendaharaan daerah	a) Menerbitkan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan b) Transparansi, Akuntabel dan Singronisasi Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran dalam penyusunan anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang c) Menerbitkan Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan daerah
		Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan	a) Memanfaatkan Terknologi Informatika dalam pengelolaan keuangan daerah b) Penyempurnaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kebijakan menerbitkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
		Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Barang Milik Daerah	a) Menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan barang Milik Daerah

			<p>b) Melaksanakan Pencatatan Aset yang bertambah dan berkurang</p> <p>c) Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Vertikal terkait dengan pengalihan aset</p>
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan PAD	<p>a). Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi daerah</p> <p>b). Melaksanakan Even-ewan untuk mendorong minat masyarakat untuk membayar pajak</p> <p>c). Mengawasi pemungutan pajak dan retribusi dengan melakukan uji petik</p> <p>d). Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pelaksanaan Tugas Pemungutan Pajak dan Retribusi</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk periode 2019-2023, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BPKD dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2019-2023. Keterkaitan sasaran, program dan kegiatan pada BPKD dapat dijelaskan pada tabel 5.1 berikut

Tabel 5.1
Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BPKD
Kota Padang Panjang 2019-2023

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Keterangan
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Penganggaran dan Perbendaharaan Daerah	1. Penyusunan Ranperda tentang APBD 2. Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD 3. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah 4. Penelitian dan Penggandaan DPA 5. Penyusunan Standar Biaya 6. Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah 7. Penyusunan KUA PPAS 8. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 9. Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 10. Kajian Investasi Penyertaan Modal Daerah	Program dan Kegiatan tahun 2020-2023
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 2. Penyusunan Ranperda tentang APBD 3. Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD 4. Penyusunan ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Program dan Kegiatan Tahun 2019

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah 6. Penelitian dan Penggandaan DPA 7. Penyusunan Standar Biaya 8. Penyusunan KUA PPAS 9. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 10. Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah 11. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun daerah 12. Verifikasi data laporan Keuaangan OPD 13. Rekonsiliasi Keuangan daerah 14. Kajian Investasi Penyertaan Modal Daerah 	
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah	Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi data laporan Keuaangan OPD 2. Rekonsiliasi Keuangan daerah 3. Penyusunan Kebijakan akuntansi Pemerintah daerah 4. Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 5. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun daerah 6. Penyusunan ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 	Program Dan Kegiatan tahun 2020-2023
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah	Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pelaporan semesteran dan tahunan Barang Milik Daearah 2. Penghapusan dan penjualan BMD 3. Penyajian Data asset 4. Penyusunan RKBMD, RKPBMd, DKBMD dan DKPBMD dan Penyusn 5. Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah 	Program Dan Kegiatan tahun 2020-2023

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pelaporan semesteran dan tahunan Barang Milik Daerah 2. Penghapusan dan penjualan BMD 3. Penyajian Data asset 4. Penyusunan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD 5. Sensus Aset Barang Milik Daerah 6. Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD 	Program Dan Kegiatan tahun 2019
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah 2. Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 serta BPHTB 3. Pendataan Objek pajak 4. Penghapusan data piutang penyerahan PBB-P2 5. Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang 6. Pekan Pajak Daerah 7. Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 8. Penyusunan Zona Nilai tanah 	Program Dan Kegiatan tahun 2020-2023
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah 2. Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 serta BPHTB 3. Pendataan Objek pajak 4. Penghapusan data piutang penyerahan PBB-P2 5. Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang 6. Pekan Pajak Daerah 	Program Dan Kegiatan tahun 2019

Untuk lebih jelasnya program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada 5.2 berikut ini :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018-2023

Kota Padang Panjang

Tujuan	Indikator Tujuan / sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Ket	Lokasi		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah							WTP	10,677,673,600	WTP	9,558,684,520	WTP	9,951,774,824	WTP	11,450,915,381	WTP	11,225,685,138	WTP	54,054,495,039			
				01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran		90%	6.626,619,000	91%	6,291,406,920	92%	6,610,301,704	93%	6,616,060,725	94%	6,622,971,550	94%	32,767,359,899			
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	0%	3 Jenis	14,750,000	-	0	-	0	-	0	-	0	3 Jenis	14,750,000	BPKD		Padang Panjang

				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	0%	60 rekening	305,800,000	-	0	-	0	-	0	-	0	60 rekening	305,800,000	BPKD		Padang Panjang
				03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	0%	8 unit roda 4, 26 unit roda 2	463,681,000	8 unit roda 4, 26 unit roda 2	417,312,900	8 unit roda 4, 26 unit roda 2	463,681,000	8 unit roda 4, 26 unit roda 2	463,681,000	8 unit roda 4, 26 unit roda 2	463,681,000	40 unit roda 4, 130 unit roda 2	2,272,036,900	BPKD		Padang Panjang
				04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	0%	1 unit	322,959,000	1 unit	387,550,000	1 unit	387,550,800	1 unit	387,550,800	1 unit	387,550,800	5 unit	1,873,161,400	BPKD		Padang Panjang
				05	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	0%	25 Jenis	129,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	25 Jenis	129,000,000	BPKD		Padang Panjang
				06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0%	2 Jenis	232,598,000	-	0	-	0	-	0	-	0	2 Jenis	232,598,000	BPKD		Padang Panjang
				07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	0%	20 jenis	7,827,000	-	0	-	0	-	0	-	0	20 jenis	7,827,000	BPKD		Padang Panjang
				08	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	0%	1.300 ok	99,000,000	1.300 ok	89,100,000	1.300 ok	118,800,000	1.300 ok	118,800,000	1.300 ok	118,800,000	6.500 ok	544,500,000	BPKD		Padang Panjang
				09	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	0%	10 orang	205,954,000	10 orang	359,944,800	10 orang	359,944,800	10 orang	359,944,800	10 orang	359,944,800	50 orang	1,645,733,200	BPKD		Padang Panjang

				11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti	0%	65 orang/kali	420,000,000	65 orang/kali	378,000,000	65 orang/kali	504,000,000	65 orang/kali	504,000,000	65 orang/kali	504,000,000	325 orang/kali	2,310,000,000	BPKD		Padang Panjang
				15	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang diasuransikan	0%	4 polis	2,454,050,000	4 polis	2,944,860,000	4 polis	2,944,860,000	4 polis	2,944,860,000	4 polis	2,944,860,000	20 polis	14,233,490,000	BPKD		Padang Panjang
				16	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola Keuangan daerah	0%	75 orang	1,900,000,000	75 orang	900,000,000	75 orang	900,000,000	75 orang	900,000,000	75 orang	900,000,000	375 orang	5,500,000,000	BPKD		Padang Panjang
				17	Penyediaan sewa tanah	Jumlah tanah yang disewakan untuk kepentingan publik	0%	6 kapling	71,000,000	6 kapling	85,200,000	6 kapling	85,200,000	6 kapling	85,200,000	6 kapling	85,200,000	30 kapling	411,800,000	BPKD		Padang Panjang
				18	Pengadaan Cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat, Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan, Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0%	0%	0	30 Jenis	355,434,120	30 Jenis	469,912,704	30 Jenis	475,671,725	30 Jenis	482,279,550	120 Jenis	1,783,298,099	BPKD		Padang Panjang
				19	Penyediaan Komponen dan jasa komunikasi sumber daya air listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	0%	0%	0	60 rekening	374,005,100	60 rekening	376,352,400	60 rekening	376,352,400	60 rekening	376,655,400	240 rekening,	1,503,365,300	BPKD		

					Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor				20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		28 Jenis				
				0 2	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		90%	527,100,000	92%	298,050,0 00	94%	413,400,0 00	96%	1,377,560,0 00	98%	413,40 0,000	98%	3,029,510 ,000		
				0 5	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasiona l	0%	-	-	Kendaraa n roda 2 8 unit, 1 unit ,obil keliling pajak daerah	-	Kendaraa n, roda 4 1unit	-	Kendar aan roda 4 1 unit	-	Kendaraa n roda 4 1 unit	-	Kendaraa n roda 4 4 unit, roda 2 8 unit	0	BPKD	Padan g Panja ng
				0 2	Pengadaan perlengkap an gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0%	10 unit PC, 25 unit UPS, 10 unit printer, 5 unit laptop, 2 unit printer laser jet, 1 unit mesin FC,, 2 unit speaker, 1 set CCTV, 1 unit lemari kayu	322,600,000	5 unit scanner, 5 unit printer, 1 set meja rapat, 2 unit infocus, 5 unit PC, 50 buah kursi susun, 5 buah meja 1/2 biro, 2 buah rol o pack, 4 set coffeema ker	0	5 unit penghanc ur kertas, 5 unit PC, 1 buah kursi kerja pejabat, 60 buah kursi kerja. 5 unit kursi tunggu, 5 unit printer	200,000,0 00	5 unit PC, 5 unit printer , 2 unit camer a, 1 unit mesin porpor asi, 1 unit drone	0	10 unit PC,, 10 unit printer, 5 unit laptop, 2 unit printer laser jet, 5 unit ac	200,00 0,000	20 unit PC, 25 unit UPS, 25 unit printer, 10 unit laptop, 4 unit printer laser jet, 1 unit mesin FC,, 2 unit speaker, 1 set CCTV, 1 unit lemari kayu, 5 Unit penghac ur kertas, 1 buah kursi kerja pejabat, 60 buah kursi kerja, 5 Unit kursi tunggu, 5 Unit AC	722,600,0 00	BPKD	Padan g Panja ng
				0 6	Pemelihara an rutin/berkal a gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0%	1 Unit	160,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Unit	160,000,0 00	BPKD	Padan g Panja ng

				07	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	0%	12 Unit	44,500,000	-	0	-	0	-	0	-	0	12 unit	44,500,000	BPKD		Padang Panjang
				09	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah lift yang terpasang	0%	-	-	-	0	0%	0	0%	0	0%	0	1 buah lift	0	BPKD		Padang Panjang
				10	Rehab ringan /sedang / berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	0%	-	-	-	-	-	0	1 Gedung	800,096,685	-	0	1 Gedung	800,096,685	BPKD		Padang Panjang
				11	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung dan Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	0%	-	-	13 Unit	184,050,000	13 Unit	213,400,000	13 Unit	413,303,315	13 Unit	213,400,000	52 Unit	1,024,153,315	BPKD		Padang Panjang
				13	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	0%	0%	-	140 stel	114,000,000	0%	0	140 stel	164,160,000	0%	0	205 stel	239,160,000	BPKD		Padang Panjang
				4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah daerah yang akuntabel, transparan, Tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	19,996,600	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	19,996,600	BPKD		
					Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Perencanaan dan Pelaporan	0%	6 laporan	5,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5,000,000	BPKD		Padang Panjang

					Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan keuangan semesteran daerah dan buku laporan prognosis realisasi anggaran yang akurat	0%	95 buku	14,996,600	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14,996,600	BPKD		Padang Panjang
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12%	100,000,000	25%	90,000,000	37%	100,000,000	49%	100,000,000	62%	100,000,000	62%	490,000,000			
				03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis	0%	8 orang/kali	100,000,000	8 orang/kali	45,000,000	8 orang/kali	50,000,000	8 orang/kali	50,000,000	8 orang/kali	60,000,000	40 orang/kali	305,000,000	BPKD		Padang Panjang
				04	Pelatihan dan Pengembangan SDM Aparatur	Jumlah pegawai dilingkungan BPKD yang mengikuti pelatihan	0%	0%	0	72 orang/kali	45,000,000	72 orang/kali	50,000,000	72 orang/kali	50,000,000	72 orang/kali	40,000,000	288 orang/kali	185,000,000	BPKD		Padang Panjang
				15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	ketepatan waktu penyusunan APBD dan Penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan		Tepat	1,503,190,000	-	0	-	0	-	0	-	0	Tepat	1,503,190,000	BPKD		Padang Panjang

				01	Penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah	Jumlah buku Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah	0%	50 buku	30,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	50 buku	30,000,000	BPKD		Padang Panjang
				02	Penyusunan Ranperda tentang APBD	Jumlah dokumen Ranperda dan Perda APBD serta Ranperwako dan Buku Perwako Pergeseran APBD	0%	5 Dokumen	157,950,000	-	0	-	0	-	0	-	0	5 Dokumen	157,950,000	BPKD		Padang Panjang
				03	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen ranperda dan Perda APBD Perubahan serta Ranperwako dan Perwako Perubahan APBD	0%	4 Dokumen	143,240,000	-	0	-	0	-	0	-	0	4 Dokumen	143,240,000	BPKD		Padang Panjang
				15	Penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah buku Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	0%	110 buku	88,620,000	-	0	-	0	-	0	-	0	110 buku	88,620,000	BPKD		Padang Panjang
				05	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelatihan SIPKD aset dan keuangan serta e-budgeting bagi admin dan operator SIPKD OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	0%	2kali pelatihan	199,996,000	-	0	-	0	-	0	-	0	2kali pelatihan	199,996,000	BPKD		Padang Panjang
						Jumlah Pemeliharaan server aplikasi dan hardware	0%	1 Tahun											1 Tahun			

				22	Penelitian dan Penggandaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Jumlah buku DPA dan DPPA SKPD Kota Padang Panjang	0%	600 buku	54,505,000	-	0	-	0	-	0	-	0	600 buku	54,505,000	BPKD		Padang Panjang
				36	Penyusunan Standar Biaya	Jumlah buku standar biaya	0%	70 buku	4,710,000	-	0	-	0	-	0	-	0	70 buku	4,710,000	BPKD		Padang Panjang
				38	Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	0%	2 dokumen	284,250,000	-	0	-	0	-	0	-	0	2 dokumen	284,250,000	BPKD		Padang Panjang
				39	Penyusunan KUA-PPAS Perubahan	Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan	0%	2 dokumen	122,600,000	-	0	-	0	-	0	-	0	2 dokumen	122,600,000	BPKD		Padang Panjang
				37	Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok keuangan Daerah	Jumlah dokumen ranperda tentang pokok-pokok keuangan daerah	0%	1 dokumen	50,625,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	50,625,000	BPKD		Padang Panjang
				14	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun daerah	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun	0%	100 Buku	116,800,000	-	0	-	0	-	0	-	0	100 Buku	116,800,000	BPKD		Padang Panjang
				09	Verifikasi data laporan keuangan SKPD	Jumlah buku informasi dan laporan SKPD yang akurat per triwulan	0%	48 Buku	49,894,000	-	0	-	0	-	0	-	0	48 Buku	49,894,000	BPKD		Padang Panjang
				10	Rekonsiliasi keuangan daerah	Jumlah Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan daerah yang dilakukan	0%	39 kali	100,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	39 kali	100,000,000	BPKD		Padang Panjang
						Jumlah laporan data hasil rekonsiliasi keuangan daerah		2 Dokumen										2 Dokumen				

				1 1	Kajian Investasi penyertaan modal daerah	Jumlah dokumen kajian yang disusun	0%	2 dokumen	100,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	2 dokumen	100,000,000	BPKD		Padan g Panja ng
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Menin gkatn ya Penge lolaan Keuan gan Daera h	Ketep atan Penya jian Lapor an Keuan gan sesuai SAP	1 5	Program Peningkata n Pengelolaa n Pengangga ran dan Perbendah araan Daerah	Penyusunan APBD/APBDP Kota Padang Panjang yang tepat waktu				Tepat	1,264,477 ,200	Tepat	1,517,372 ,640	Tepat	1,791,454,0 80	Tepat	2,086,5 04,897	Tepat	6,661,808 ,816	BPKD		Padan g Panja ng
						Realisasi pencairan anggaran tepat waktu Sesuai RAK					74%		76%		78%		80%		80%			
				0 2	Penyusuna n Ranperda tentang APBD	Jumlah dokumen Ranperda dan Perda APBD serta Ranperwako dan Buku Perwako Pergeseran APBD	0%			5 Dokumen	189,540,0 00	5 Dokumen	227,448,0 00	5 Dokum en	272,937,600	5 Dokumen	327,52 5,120	20 Dokume n	1,017,450 ,720	BPKD		Padan g Panja ng
				0 3	Penyusuna n Ranperda tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen ranperda dan Perda Perubahan serta Ranperwako dan Perwako Perubahan APBD	0%			4 Dokumen	171,888,0 00	4 Dokumen	206,265,6 00	4 Dokum en	247,518,720	4 Dokumen	297,02 2,464	16 Dokume n	1,065,934 ,784	BPKD		Padan g Panja ng
				0 5	Pengelolaa n Sistem Informasi Pengelolaa n Keuangan Daerah	Jumlah pelatihan SIPKD aset dan keuangan serta e-budgeting bagi admin dan operator SIPKD OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	0%			2kali pelatihan	239,995,2 00	2kali pelatihan	287,994,2 40	2kali pelatih an	316,200,000	2kali pelatihan	316,20 0,000	8 kali pelatihan	1,360,385 ,440	BPKD		Padan g Panja ng

					Jumlah Pemeliharaan server aplikasi dan hardware				1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		4 Tahun					
				36	Penyusunan Standar Biaya	Jumlah buku standar biaya di Kota Padang Panjang	0%	-		70 buku	5,652,000	70 buku	6,782,400	70 buku	8,138,880	70 buku	9,766,656	280 buku	35,049,936	BPKD		Padang Panjang
				37	Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok keuangan Daerah	Jumlah dokumen ranperda tentang pokok-pokok keuangan daerah	0%	-		1 dokumen	54,750,000	1 dokumen	65,700,000	1 dokumen	78,840,000	1 dokumen	94,608,000	4 dokumen	344,523,000	BPKD		Padang Panjang
				38	Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	0%	-		2 dokumen	315,532,000	2 dokumen	385,664,000	2 dokumen	453,166,080	2 dokumen	549,799,298	8 dokumen	1,706,161,376	BPKD		Padang Panjang
				39	Penyusunan KUA-PPAS Perubahan	Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan	0%	-		2 dokumen	147,120,000	2 dokumen	176,544,000	2 dokumen	211,852,800	2 dokumen	254,223,360	8 dokumen	912,340,160	BPKD		Padang Panjang
				01	Penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah	Jumlah buku Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah	0%	-		50 Buku	30,000,000	0%	0	50 Buku	30,000,000	50 Buku	30,000,000	150 Buku	90,000,000	BPKD		Padang Panjang
				11	Kajian Investasi penyertaan modal daerah	Jumlah dokumen kajian yang disusun	0%	-		2 dokumen	110,000,000	2 dokumen	160,974,400	2 dokumen	172,800,000	2 dokumen	207,360,000	8 dokumen	751,134,400	BPKD		Padang Panjang
				15	Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP		-	0	Tepat	576,376,800	Tepat	655,652,160	Tepat	786,782,592	Tepat	944,139,110	Tepat	2,962,950,662	BPKD		Padang Panjang

				09	Verifikasi data laporan keuangan SKPD	Jumlah buku informasi data laporan SKPD yang akurat per triwulan	0%	-	0	50 Buku	52,500,000	50 Buku	71,847,360	50 Buku	86,212,832	50 Buku	103,460,198	200 Buku	314,020,390	BPKD		Padang Panjang
				10	Rekonsiliasi keuangan daerah	Jumlah Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan daerah yang dilakukan	0%	-	0	40 Kali	120,000,000	40 Kali	144,000,000	40 Kali	172,800,000	40 Kali	237,360,000	160 Kali	674,160,000	BPKD		Padang Panjang
						Jumlah laporan data hasil rekonsiliasi keuangan daerah				2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen				
				12	Penyusunan Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi yang disusun	0%	-	-	-	0	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	-	0	2 dokumen	140,000,000	BPKD		Padang Panjang
				13	Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen SAP yang disusun	0%	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	2 dokumen	140,000,000	BPKD		Padang Panjang
				14	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun daerah	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun	0%	-	0	100 Buku	310,756,800	100 Buku	242,192,000	100 Buku	201,830,400	100 Buku	282,196,480	400 Buku	1,036,975,680	BPKD		Padang Panjang
				15	Penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Buku ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0%	-	0	110 Buku	93,120,000	110 Buku	127,612,800	110 Buku	185,939,360	110 Buku	241,122,432	440 Buku	647,794,592	BPKD		Padang Panjang

				17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pelaporan, Penyajian Data Aset Tepat Waktu		Tepat	273,568,000	-	0	-	0	-	0	-	0	Tepat	273,568,000	BPKD		Padang Panjang
				01	Penyusunan Pelaporan Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah	Jumlah buku laporan semesteran dan tahunan aset yang disusun	0%	60 buku	17,040,000	-	0	-	0	-	0	-	0	60 buku	17,040,000	BPKD		Padang Panjang
				02	Penghapusan dan penjualan BMD	Jumlah Proses Penghapusan dan Penjualan BMD	0%	4 kali	109,253,000	-	0	-	0	-	0	-	0	4 kali	109,253,000	BPKD		Padang Panjang
				04	Penyajian data aset	Jumlah buku data aset tetap Pemerintah Kota Padang Panjang	0%	60 buku	11,620,000	-	0	-	0	-	0	-	0	60 buku	11,620,000	BPKD		Padang Panjang
				05	3.Penyusunan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD	Jumlah Buku RKBMD dan RKPBM Kota Padang Panjang	0%	30 buku	18,465,000	-	0	-	0	-	0	-	0	30 buku	18,465,000	BPKD		Padang Panjang
				09	Sensus aset barang milik daerah	Jumlah buku laporan inventarisasi / sensus barang milik daerah	0%	30 buku	100,600,000	-	0	-	0	-	0	-	0	30 buku	100,600,000	BPKD		Padang Panjang
				08	Penyusunan Perubahan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD	Jumlah buku perubahan RKBMD dan RKPBM Kota Padang Panjang	0%	30 buku	16,590,000	-	0	-	0	-	0	-	0	30 buku	16,590,000	BPKD		Padang Panjang

				17	Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah	Pelaporan, Penyalinan data BMD tepat waktu		-	0	Tepat waktu	308,373,600	Tepat waktu	370,048,320	Tepat waktu	444,057,984	Tepat waktu	532,869,581	Tepat waktu	1,639,768,669	BPKD		Padang Panjang
				01	Penyusunan Pelaporan Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah	Jumlah buku laporan semesteran dan tahunan aset yang disusun	0%	-	17,040,000	60 buku	20,448,000	60 buku	24,537,600	60 buku	29,445,120	60 buku	35,334,144	240 buku	126,804,864	BPKD		Padang Panjang
				02	2. Penghapusan dan penjualan BMD	Jumlah Proses Penghapusan dan Penjualan BMD	0%	-	109,253,000	4 kali	131,103,600	4 kali	157,324,320	4 kali	188,789,184	4 kali	226,547,021	16 kali	813,017,125	BPKD		Padang Panjang
				04	4. Penyalinan data aset	Jumlah buku data aset tetap Pemerintah Kota Padang Panjang	0%	-	11,620,000	60 buku	104,756,000	60 buku	107,707,200	60 buku	129,248,640	60 buku	155,098,368	240 buku	336,471,392	BPKD		Padang Panjang
				5	3. Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD dan Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	Jumlah Buku RKBMD dan RKPBMD, serta buku Perubahan RKBMD dan RKPBMD Kota Padang Panjang	0%	-	18,465,000	60 buku	42,066,000	60 buku	80,479,200	60 buku	96,575,040	60 buku	115,890,048	240 buku	353,475,288	BPKD		Padang Panjang

				6	Pensertifikasi tanah Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan	0%	-	0	4 sertifikat	10,000,000	-	0	-	0	-	0	4 sertifikat	10,000,000	BPKD		Padang Panjang
				17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah		5%	1,627,200,000	-	0	-	0	-	0	-	0	5%	1,627,200,000	BPKD		Padang Panjang
				01	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Dan Retribusi Daerah	0%	15 M	980,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	100 M	980,000,000	BPKD		Padang Panjang
				04	3. Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 Serta BPHTB	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan	0%	1400 lbr	141,080,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1400 lbr	141,080,000	BPKD		Padang Panjang
				05	Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	Jumlah Kajian Potensi PAD	0%	1 Kajian	50,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Kajian	50,000,000	BPKD		Padang Panjang
				06	Pekan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pekan Pajak Daerah, Reward bagi wajib Pajak Daerah	0%	2 lvent	200,800,000	-	0	-	0	-	0	-	0	2 lvent	200,800,000	BPKD		Padang Panjang

				07	Pendataan Objek Pajak	Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi Update data objek Pajak PBB-P2	0%	16 kelurahan	209,400,000	-	0	-	0	-	0	-	0	16 kelurahan	209,400,000	BPKD		Padang Panjang
				08	Penghapusan Data Piutang Penyerahan PBB-P2	Jumlah perwako tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 Kota Padang Panjang	0%	1 Perwako	45,920,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Perwako	45,920,000	BPKD		Padang Panjang
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	17	Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah		-		5%	730,000,000	5%	285,000,000	5%	335,000,000	5%	525,800,000	25%	1,875,800,000	BPKD		Padang Panjang
				01	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah	0%	-	0	7,915,000,000	150,000,000	8,000,000,000	80,000,000	8,000,000,000	100,000,000	8,000,000,000	150,000,000	31,915,000,000	480,000,000	BPKD		Padang Panjang
				03	Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak	0%	-	0	50 objek pajak	30,000,000	50 objek pajak	35,000,000	50 objek pajak	40,000,000	50 objek pajak	45,000,000	200 objek pajak	150,000,000	BPKD		Padang Panjang
					Jumlah OPD Pengelola Retribusi					11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD		44 OPD				

				04	Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 Serta BPHTB	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan	0%	-	0	1400 lbr	100,00,000	1400 lbr	70,000,000	1400 lbr	70,000,000	1400 lbr	100,000,000	5600 lbr	340,000,000	BPKD		Padang Panjang
				05	Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	Jumlah Kajian Potensi PAD	0%	-	0	1 Kajian	100,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	1 Kajian	100,000,000	BPKD		Padang Panjang
				06	Pekan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pekan Pajak Daerah, Reward bagi wajib Pajak Daerah	Ivent	-	0	-	0		0		0	4 Ivent	130,800,000	4 Ivent	130,800,000	BPKD		Padang Panjang
				07	Pendataan Objek Pajak	Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi Update data Pajak Objek PBB-P2	0%	-	0	16 kelurahan	150,000,000	16 kelurahan	100,000,000	16 kelurahan	100,000,000	16 kelurahan	100,000,000	64 kelurahan	450,000,000	BPKD		Padang Panjang
				08	Penghapusan Data Piutang Penyerahan PBB-P2	Jumlah perwako tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 Kota Padang Panjang	0%	-	0	-	0	-	0	1 perwako	25,000,000	-	0	1 perwako	25,000,000	BPKD		Padang Panjang
				10	Penyusunan Zona nilai tanah	Jumlah Dokumen zona nilai tanah	0%	-	0	1 dokumen	200,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	1 dokumen	200,000,000	BPKD		Padang Panjang

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023 program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang menjadi program dalam pencaian Tujuan dan Sasaran RPJMD terlihat pada tabel 6 berikut ini:

TABEL 7

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2019-2023**

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL PADA PERIODE RPJMD	KONDISI KINERJA PADA TAHUN BERJALAN DAN AKHIR PERIODE RPJMD					
			1	2	3	4	5	Kondisi Akhir Periode RPJMD
1	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	-	5%	5%	5%	5%	5%	25%
4	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundang-undangan	-	Tepat	-	-	-	-	Tepat

5	Penyusunan APBD/ APBDP Kota Padang Panjang yang tepat waktu	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu RAK	-	-	74%	76%	78%	80%	80%
6	Pelaporan, Penyajian data aset tepat waktu	-	Tepat	-	-	-	-	Tepat
7	Pelaporan, Penyajian data BMD tepat waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Berdasarkan tabel indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diatas terdapat Program yang akan mencapai target indikator kinerja yaitu : Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Daerah disamping merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi serta program daerah secara umum juga dimaksudkan sebagai pedoman, arah dan kerangka kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Pelaksanaan dari RENSTRA Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya melingkupi segenap struktur organisasi dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki kewajiban yang sama untuk senantiasa memelihara dan menjamin konsistensi antara kebijakan dan strategi dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Secara garis besar organisasi pelaksana dari Rencana Strategis tersebut terdiri dari :

1. Sekretariat serta seluruh bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
2. Sekretariat serta Bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah berkewajiban membuat dan merencanakan program serta kegiatan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit;
3. Guna terciptanya efektivitas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap bidang diharapkan melakukan kontrol untuk mengevaluasi sejauh mana capaian program dan kegiatan dalam lingkup unit masing-masing;
4. Untuk menjamin konsistensi dari pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka setiap terjadinya perubahan ataupun penambahan program , perlu dikonsultasikan bersama melalui sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebelum program tersebut dijabarkan dan dilaksanakan.

7.2 Pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, program dan kegiatan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan, dilaksanakan secara terintegrasi dengan jalan :

1. Pada tiap akhir tahun anggaran, seluruh unit baik sekretariat maupun bidang dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik kesesuaian dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan maupun kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur serta peraturan-peraturan lainnya;
2. Guna menjaga efektifitas pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan bersama, maka setiap bidang wajib melakukan pemantauan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Dinas melalui Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah cq. Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

Padang Panjang, Januari 2019
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
Pembina, NIP. 19700804 199803 1 006



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENGELOLA KEUANGANDAERAH
KOTA PADANG PANJANG
2019-2023**

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
2019**

